

**ANALISIS SEKTOR BASIS DI KABUPATEN KUDUS  
PADA TAHUN 2011-2015**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Dhea Ayu Kinanti  
135020507114008**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

**THE BASIC SECTORS OF KUDUS REGENCY IN THE  
PERIOD OF 2011-2015**

**SCIENTIFIC JOURNALS**

**By:**

**Dhea Ayu Kinanti  
135020507114008**



**DEPARTMENT OF ECONOMICS  
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS  
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**



## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **Analisis Sektor Basis di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2011-2015**

Yang disusun oleh :

Nama : Dhea Ayu Kinanti  
NIM : 135020507114008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13Oktober 2017

Malang, Oktober 2017

Dosen Pembimbing,

**Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D**

NIP. 197009221995121002

# ANALISIS SEKTOR BASIS DI KABUPATEN KUDUS PADA TAHUN 2011-2015

Dhea Ayu Kinanti  
Arif Hoctoro., SE., MT., Ph.D

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang  
Email: dheakinanti200@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektoral yang unggulan di Kabupaten Kudus, dimana data yang diteliti dari PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015. Untuk mengetahui sektoral di Kabupaten Kudus termasuk sektor basis ataupun tidak basis dengan menggunakan alat analisa data yaitu Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Hasil penelitian ini adalah sektor industri pengolahan merupakan sektor basis dikarenakan ada salah satu subsektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus bahkan membantu perekonomian di negara Indonesia, namun berdasarkan analisa Shift Share dan MRP sektor pertanian, kehutanan & perikanan dan sektor perdagangan besar dan perdagangan eceran pertumbuhannya pertumbuhannya cepat maka kedua sektor ini mampu dikembangkan untuk menjadi sektor basis.*

**Kata Kunci:** PDRB, Location Quotient (LQ), Shift Share, Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

## ABSTRACT

*This aims of this research is to determine leading sectoral in Kudus Regency, where the data studied from PDRB Kudus Regency 2011-2015 year. To know the sectoral in Kudus Regency including base sector or not base by using data analysis tool that is Location Quotient (LQ), Shift Share, and Growth Ratio Model (MRP). The result of this research is processing industry sector is base sector because there is one sub-sector that contribute greatly to the economy in Kabupaten Kudus even help the economy in the country of Indonesia, but based on analysis of Shift Share and MRP of agriculture sector, forestry & fishery and big trading sector and retail trade growth is fast growth then both sectors can be developed to become base sector.*

**Keyword:** PDRB, Location Quotient (LQ), Shift Share, Growth Rasio Model (MRP)

---

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional sejak repelita VI, hal ini dikarenakan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Kemudian tercipta otonomi daerah yang telah ditetapkan tahun 2004 dan telah diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 mengenai "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun regional adalah suatu kegiatan yang berlangsung dan berkesinambungan mengikuti pola berdasarkan hasil terhadap situasi dan kondisi baik. Pembangunan perlu dilakukan secara menyeluruh dan tuntas sehingga optimal. Perencanaan pembangunan ekonomi berupaya dapat meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Pembangunan dapat diarahkan pada 3 hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan taraf hidup atau standart hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial (Todaro, 2000). Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempersempit ketimpangan regional dengan menerapkan kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan berdasarkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Kawasan andalan merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (primer mover) dengan ciri kawasan tersebut mampu lebih tumbuh dengan cepat dibandingkan kawasan lainnya seperti memiliki keunggulan dalam sektor yang mampu meningkatkan perekonomian daerahnya ( Pujiati, 2006).

Kabupaten Kudus berada pada tingkat ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Padahal untuk kabupaten seharusnya nilai rata-rata PDRB lebih rendah jika dibandingkan dengan kota dan jika dilihat berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan ekonomi seharusnya lebih tinggi di perkotaan jika dibandingkan dengan pendapatan di daerah kabupaten. Namun hal ini tidak terjadi di Kabupaten Kudus karena daerah ini memiliki satu sektor yang sudah ternama puluhan tahun yaitu sektor industri, bahkan sektor industri di Kabupaten Kudus membantu perekonomian di Indonesia. Namun Kabupaten Kudus dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB ataupun perekonomian daerahnya masih kalah saing dengan kota Semarang ataupun kota Cilacap. Berdasarkan sumber Kabupaten Kudus juga dijadikan sebagai daerah yang proinvestasi di provinsi Jawa Tengah dan dijadikan sebagai trade center, maka penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keadaan sektoral dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus dan juga memberikan kontribusi untuk perekonomian di negara Indonesia namun kabupaten Kudus masih kalah saing jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah bagian timur kota Semarang. Letak Kabupaten Kudus secara geografis cukup strategis berada pada jalur perlintasan ekonomi antar provinsi sehingga daerah ini dijadikan sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kawasan perdagangan yang berpotensi sebagai pusat perdagangan (*Trade Centre*) berskala internasional. Kabupaten Kudus memiliki keunggulan sebagai salah satu kabupaten yang proinvestasi di Jawa Tengah hal ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya Kudus sebagai kabupaten proinvestasi peringkat VI dari 32 Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, dilihat berdasarkan perekonomian di kota Kudus yang diketahui melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) karena menyangkut segala aktivitas yang bersangkutan dengan perekonomian daerah. Apabila PDRB setiap tahunnya meningkat maka perekonomian di daerah tersebut ikut serta meningkat dan sebaliknya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka skripsi ini disusun dengan judul “Analisis Sektor Basis di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2011-2015”.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah domestik di negara yang menyebabkan aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku dikenal dengan PDRB nominal yang disusun berdasarkan harga berlaku yang bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas harga konstan (rill) berdasarkan harga pada tahun dasar yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. (BPS, 2016)

### **Konsumsi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah**

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi dilakukan setiap hari oleh manusia agar mendapatkan kepuasan dan mencapai kemakmuran yang artinya manusia tersebut tercukupi kebutuhan secara rohani dan jasmani, kebutuhan pokok ataupun tersier. Barang ataupun jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk dalam kategori “konsumsi” karena konsumsi sendiri merupakan penggunaan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi tidak untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Menurut Mankiw, konsumsi

merupakan pembelanjaan barang ataupun jasa untuk kebutuhan rumah tangga (kecuali membeli rumah baru). “Barang” yang dimaksud dalam kategori ini adalah pembelanjaan rumah tangga yang awet seperti mobil dan alat rumah tangga sedangkan untuk barang yang tidak awet seperti sandang dan pangan. “Jasa” dalam kategori ini meliputi barang yang tidak kasat mata, contohnya layanan kesehatan dan pendidikan.

Investasi adalah membeli barang yang digunakan untuk masa yang akan datang dan menghasilkan barang ataupun jasa yang lebih banyak. Investasi adalah pembelian sejumlah peralatan untuk modal, persediaan, dan bangunan atau struktur. Jadi investasi merupakan menanam sumber daya saat ini atau mengalokasikannya, dengan tujuan mendapatkan manfaat yang lebih atau keuntungan dimasa yang akan datang. Adapun peranan investasi bagi pembangunan daerah :

a. Sumber Modal

Modal merupakan faktor utama dalam kegiatan usaha, dengan adanya modal mampu mengembangkan kelangsungan dari usaha tersebut. Maka diperlukan kegiatan investasi yang mampu dijadikan sebagai sumber modal bagi pembangunan yang dilaksanakan.

b. Alih Teknologi

c. Menambah Lapangan Kerja

Adanya investasi akan meningkatkan sektor riil, yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

d. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah berupaya mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan daerah. Sektor yang menjadi sumber pendapatan daerah disebut juga sektor investasi. Apabila investor mendirikan pabrik di suatu daerah maka berdampak terhadap pekerja yang akan menerima gaji, upah, ataupun keuntungan.

Pengeluaran Pemerintah merupakan pembelanjaan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah (Mankiw, 2008). Belanja pemerintah juga mencakup upah yang diberikan untuk pegawai negeri dan pengeluaran untuk pekerjaan umum. Pengeluaran Pemerintah merupakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk membeli barang dan jasa, hal ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah merupakan membeli barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sedangkan menurut Sukirno (2000) pengeluaran pemerintah merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang ada dalam dokumen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Hal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja maupun mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan upaya mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan, dan dari status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi serta berupaya menanggulangi kemiskinan absolut (Todaro, 2000). Pembangunan ekonomi adalah proses yang saling berkaitan dan berhubungan yang mempengaruhi faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dianalisa. Dengan adanya pembangunan ekonomi mampu mengetahui perwujudan pembangunan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan penduduk atau perkembangan PDB yang berlaku di masyarakat diikuti oleh perubahan dan modernisasi dalam struktur ekonomi secara umum maupun tradisional.

### **Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pembangunan daerah guna memperbaiki segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat dalam jangka panjang. Hakikat dari pembangunan yaitu mampu melakukan terobosan baru dan bukan menjadi gambaran ekonomi sesaat atau sementara. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya yang di miliki pada setiap daerah dan membentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, intinya pembangunan daerah bertujuan meningkatkan peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2010). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses

yang dilakukan pemerintah daerah dan komponen masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang kemudian dibentuk suatu pola kemitraan guna menciptakan lapangan kerja baru.

### **Strategi Pembangunan Ekonomi**

Strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan ataupun menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja untuk penduduk agar mencapai stabilitas ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat berhasil apabila dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Maka hal ini mampu mengantisipasi terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral yang akan mempengaruhi kesempatan kerja. Secara garis besar ada 4 kelompok untuk strategi pembangunan ekonomi daerah, yaitu : (Arsyad, 2000)

- a. Strategi pengembangan fisik
- b. Strategi pengembangan dunia usaha
- c. Strategi pengembangan sumber daya manusia
- d. Strategi pengembangan masyarakat

### **Ketimpangan Pembangunan Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah memiliki satu tujuan yaitu untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Tingkat kemajuan perekonomian daerah menunjukkan juga peningkatan pendapatan per kapita namun hal ini tidak berarti menunjukkan jika distribusi pendapatan lebih merata. Ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan dalam kelompok sektor primer, sekunder dan tersier di dunia ketiga atau negara sedang berkembang, yaitu : (Todaro, 2000)

Ketimpangan yang terjadi di sektor primer disebabkan oleh kemampuan dan ketrampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya berada dan masih berlanjutnya praktek pertanian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan disektor sekunder adalah terpusatnya kepemilikan asset dan modal baik secara fisik maupun finansial di tangan golongan tertentu, sehingga peranan lebih besar ditangani oleh pihak yang memiliki asset dan modal tersebut.

Dalam sektor tersier atau modern, tingkat pendidikan sangat berperan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor ini. Ketimpangan ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat upah yang diterima bagi orang yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Perbedaan tingkat pendidikan dikarenakan mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak semua masyarakat dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi.

### **SEKTOR UNGGULAN**

Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif dengan sektor yang sejenis dari daerah lain serta memberikan manfaat untuk wilayah tersebut. Sektor unggulan memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian, serta permintaan yang tinggi untuk pasar lokal ataupun pasar ekspor. Sektor unggulan juga dikaitkan dengan perbandingan, baik berskala internasional, nasional hingga regional. Dalam lingkup internasional, sektor mampu dikatakan unggul apabila dapat bersaing dengan sektor yang sama pada negara lain. Sedangkan lingkup nasional, sektor dikategorikan unggul jika mampu bersaing dengan sektor yang dihasilkan sama pada wilayah lain baik pasar nasional maupun domestik. Dan apabila suatu daerah memiliki sektor unggulan maka daerah tersebut mampu memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga mampu melakukan ekspor.

Sektor unggulan adalah sektor yang dipengaruhi oleh salah satunya keberadaan faktor anugerah (endowment factors). Kemudian faktor ini berkembang melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor unggulan bervariasi, karena tergantung peranan besar sektor tersebut dalam perekonomian daerah yaitu : pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi; kedua sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja; ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun kebelakang; keempat sektor mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Ada empat syarat suatu sektor dikatakan sebagai sektor prioritas atau unggulan, yaitu : (Rachbini, 2001)

- a. Sektor tersebut menghasilkan produk yang permintaannya cukup besar,
- b. Perubahan teknologi sehingga fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas,
- c. Peningkatan investasi dari hasil produksi,
- d. Sektornya berkembang sehingga memberikan pengaruh terhadap sektor lainnya.



### Hipotesis

$H_0$  : Variabel Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ( $X_1$ ), Variabel Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ( $X_2$ ) dan Variabel Industri Pengolahan ( $X_3$ ) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) di Kudus.

$H_1$  : Variabel industri (X) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap PDRB (Y) di Kabupaten Kudus.

## C. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian diskriptif kuantitatif, dimana metode ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu wilayah secara nyata dengan penyajian data yang digunakan dalam analisis kontribusi sektoral terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini akan menganalisa peran setiap sektoral terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus yang kemudian dapat diketahui sektoral yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah. Adapun pertimbangan untuk memilih Kabupaten Kudus karena dengan luas wilayah  $425,16\text{km}^2$  (wilayahnya termasuk kecil atau tidak luas) dan jumlah penduduk 735.650 jiwa pada tahun 2014. Pemilihan Kabupaten Kudus sebagai obyek penelitian dikarenakan peneliti melihat Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala regional ataupun skala nasional, maka penelitian ini diharapkan mengetahui sektor-sektor unggulan supaya dapat digunakan sebagai informasi dan lebih diprioritaskan dalam dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data time series dengan periode pengamatan tahun 2011-2015:

- ❖ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Kudus tahun 2011 hingga tahun 2015.
- ❖ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 hingga tahun 2015.
- ❖ Total tenaga kerja di Kabupaten Kudus

### Metode Analisa

Analisis LQ (Location Quotient)

$$LQ = (V_1^R / V^R) : (V_1 / V), \text{ dimana}$$

$V_1^R$  : jumlah PDRB suatu sektor di suatu kabupaten Kudus.

$V^R$  : jumlah PDRB seluruh sektor di suatu kabupaten Kudus.

$V_1$  : jumlah PDRB suatu sektor di tingkat provinsi Jawa Tengah.

$V$  : jumlah PDRB seluruh sektor di tingkat provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

Jika  $LQ > 1$ , merupakan sektor basis yang artinya daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya akan sektor i juga dapat memberikan peluang dan potensi ekspor ke wilayah lain karena ada surplus di sektor i. Maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut berspesialisasi pada sektor basis atau sektor unggulan.

Jika  $LQ < 1$ , merupakan sektor non basis yang artinya sektor i tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan daerah tersebut memiliki kecenderungan melakukan impor dari daerah lain.

Jika  $LQ = 1$ , artinya sektor i mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dan produksi domestik habis dikonsumsi daerah tersebut.

Analisis Shift-Share

Rumus dari analisa Shift Share :

$$G_j : Y_{jt} - Y_{jo}$$

$$N_j : Y_{jo} (Y_t / Y_o) - Y_{jo}$$

$$(P+D)_j : Y_{jt} - (Y_t / Y_o) Y_{jo}$$

$$P_j : i [(Y_{it} / Y_{io}) - (Y_t - Y_o)] Y_{ijo}$$

$$D_j : t [Y_{ijt} - (Y_{it} / Y_{io}) Y_{ijo}]$$

$$: (P+D)_j - P_j$$

Keterangan :

G<sub>j</sub> : Pertumbuhan PDRB Total Kabupaten Kudus  
 N<sub>j</sub> : Komponen Share  
 (P + D)<sub>j</sub> : Komponen Net Shift  
 P<sub>j</sub> : Proportional Shift Kabupaten Kudus  
 D<sub>j</sub> : Differential Shift Kabupaten Kudus  
 Y<sub>j</sub> : PDRB Total Kabupaten Kudus  
 Y : PDRB Total Provinsi Jawa Timur  
 o,t : Periode awal dan Periode akhir

Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

MRP merupakan analisa yang dilakukan untuk membandingkan pertumbuhan dalam skala besar (provinsi) maupun skala yang kecil (daerah). Dalam analisa model rasio pertumbuhan (MRP) ada dua macam perhitungan yaitu rasio pertumbuhan untuk wilayah studi dan rasio pertumbuhan untuk wilayah referensi.

$$RPr = \frac{\Delta Eir / Eir(t)}{\Delta Er / Er(t)}$$

Keterangan :

$\Delta Eir$  : Selisih nilai dari PDRB sektor i awal tahun dan akhir tahun di Provinsi Jawa Tengah.  
 $\Delta Er$  : Selisih dari nilai total PDRB awal tahun dan akhir tahun di Provinsi Jawa Tengah  
 $Eir$  : PDRB sektor i pada awal tahun di Provinsi Jawa Tengah  
 $Er$  : Total PDRB di Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun

$$RPs = \frac{\Delta Eij / Eij(t)}{\Delta Eir / Eir(t)}$$

Keterangan :

$\Delta Eij$  : Selisih PDRB sektor i pada awal tahun dan akhir tahun di Kabupaten Kudus  
 $\Delta Eir$  : Selisih PDRB sektor i pada awal tahun dan akhir tahun di Provinsi Jawa Tengah  
 $Eij$  : Nilai PDRB sektor i pada awal tahun di Kabupaten Kudus  
 $Eir$  : Nilai PDRB sektor i pada awal tahun di Provinsi Jawa Tengah

Hasil RPs dan RPr :

Apabila nilai RPr (+) dan nilai RPs (+) maka pertumbuhan sektor i menonjol di wilayah referensi (provinsi) dan wilayah studi (daerah).

Apabila nilai RPr (+) dan nilai RPs (-) maka pertumbuhan sektor i menonjol di wilayah referensi (provinsi) namun di wilayah studi (daerah) tidak menonjol.

Apabila nilai RPr (-) dan nilai RPs (-) maka pertumbuhan sektor i tidak menonjol di wilayah referensi (provinsi) maupun wilayah studi (daerah).

Apabila nilai RPr (-) dan nilai RPs (+) maka pertumbuhan sektor i tidak menonjol di wilayah referensi (provinsi) namun di wilayah studi (daerah) menonjol.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Location Quotient (LQ)

Dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kudus memiliki satu sektor basis (LQ>1) yaitu sektor industri pengolahan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2,32. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Bahkan sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus sudah dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya dan berpotensi untuk melakukan kegiatan ekspor, maka sektor ini perlu ditingkatkan lebih baik karena berpotensi besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk LQ yang kurang dari satu atau masuk dalam kategori sektor non basis selama periode 2011 hingga 2015 di Kabupaten Kudus terdapat 16 sektor yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan LQ rata-rata sebesar 0,2 ; sektor Pertambangan dan Penggalian dengan LQ rata-rata sebesar 0,1 ; sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan LQ rata-rata sebesar 0,4 ;

sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Konstruksi dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan LQ rata-rata sebesar 0,4 ; sektor Transportasi dan Pergudangan dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman dengan LQ rata-rata sebesar 0,4 ; sektor Informasi dan Komunikasi dengan LQ rata-rata sebesar 0,2 ; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan LQ rata-rata sebesar 0,6 ; sektor Real Estat dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Jasa Perusahaan dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Jasa Pendidikan dengan LQ rata-rata sebesar 0,3 ; sektor Jasa Kesehatan dan Sosial dengan LQ rata-rata sebesar 0,4 ; dan sektor Jasa Lainnya dengan LQ rata-rata sebesar 0,3. Dalam berproduksi keenam belas sektor ini belum mampu dalam memenuhi kebutuhan di Kabupaten Kudus bahkan mengimpor dari luar Kabupaten Kudus.

### **Analisa Shift Share(SS)**

#### Komponen Proportional Share

Berdasarkan tabel diatas sektor-sektor yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan proporsional yang positif adalah sektor Pertambangan dan Penggalian ; sektor Industri Pengolahan ; sektor Pengadaan Listrik dan Gas ; sektor Konstruksi ; sektor Transportasi dan Pergudangan ; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ; sektor Informasi dan Komunikasi ; sektor Real Estat ; sektor Jasa Perusahaan ; sektor Jasa Pendidikan ; sektor Jasa Kesehatan dan Sosial ; dan sektor Jasa Lainnya. Hal ini berarti kedua belas sektor tersebut merupakan sektor yang berspesialisasi di Kabupaten Kudus dan pada tingkat provinsi Jawa Tengah pertumbuhannya lebih cepat.

#### Komponen Differential Share

Ada lima sektor yang nilainya negatif yaitu sektor Industri Pengolahan ; sektor Pengadaan Listrik dan Gas ; sektor Jasa Perusahaan ; sektor Jasa Pendidikan ; sektor Jasa Kesehatan dan Sosial. Kelima sektor ini pertumbuhannya lambat dan daya saingnya rendah maka berpotensi untuk dikembangkan. Sedangkan terdapat dua belas sektor yang nilainya positif yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai rata-rata sebesar 1.075,45 ; sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 693,35 ; sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 559,51 ; sektor Konstruksi sebesar 20.164,18 ; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 59.580,22 ; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.776,53 ; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11.147,80 ; sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1.957,03 ; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12.012,50 ; sektor Real Estat sebesar 3.077,78 ; sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1.295,86 ; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 5.033,34. Kedua belas sektor ini memiliki daya saing yang tinggi sehingga tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di provinsi Jawa Tengah dan sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi sektor basis.

#### **Analisa Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**

Ada tujuh sektor yang menonjol di kabupaten Kudus maupun di provinsi Jawa Tengah yaitu pertambangan dan penggalian ; konstruksi ; transportasi dan pergudangan ; penyediaan akomodasi dan makan minum ; informasi dan komunikasi ; real estat ; dan jasa lainnya.

Ada enam sektor yang pertumbuhannya menonjol di kabupaten Kudus namun tidak menonjol provinsi Jawa Tengah yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ; Pengadaan Listrik dan Gas ; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor ; Jasa Keuangan dan Asuransi ; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.

Sektor industri pengolahan ; sektor jasa perusahaan ; sektor jasa pendidikan ; sektor jasa kesehatan dan sosial merupakan sektor yang pertumbuhannya belum menonjol di Kabupaten Kudus namun menonjol di provinsi Jawa Tengah.

#### **Pembahasan**

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu industri tembakau sebesar 75.137 jiwa, selain itu industri tembakau berkontribusi sebesar 73,06% dari

total kontribusi sektor industri pada tahun 2015. Maka dari itu Kabupaten Kudus disebut sebagai “Kota Kretek“. Industri pengolahan tembakau memang sangat membantu dalam perekonomian di Kabupaten Kudus, walaupun kontribusi sektor industri dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dengan berbagai sebab seperti faktor cuaca yang menyebabkan bahan baku untuk produksi menurun, namun industri pengolahan tembakau akan tetap berkontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus. Sektor industri pengolahan tembakau merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak pada sektor industri yang akan berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Kudus. Sektor industri tembakau identik dengan “rokok” berdasarkan penelitian kabupaten Kudus mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kudus. Manfaat dari DBHCHT bisa dilihat dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk membangun instalansi paru-paru dan jantung, obat-obatan di RSUD ataupun puskesmas, kemudian di bidang infrastruktur untuk pembangunan jalan ataupun saluran dan yang terakhir dalam bidang ekonomi dimana menguatkan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau serta membentuk ketrampilan di balai kerja (BLK).

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kabupaten Kudus menunjukkan hanya ada satu sektor yang dikatakan sektor basis atau sektor unggulan dan berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor industri pengolahan. Hal ini sesuai dengan hipotesa kedua yaitu sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk keenam belas sektor di Kabupaten Kudus tidak termasuk dalam sektor basis atau sektor unggulan. Berdasarkan hipotesa, variabel pertanian dan perdagangan besar dan eceran tidak memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus. Maka sektor industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor yang prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kudus. Artinya sektor industri pengolahan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus dan mampu memenuhi daerah lain, bahkan untuk sektor industri pengolahan sudah melakukan kegiatan “ekspor” yang membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan analisa di Kabupaten Kudus menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang memiliki pertumbuhannya setiap tahun 2011 hingga tahun 2015 terus meningkat jika dibandingkan dengan sektoral industri pengolahan. Namun kedua sektor ini yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran tidak masuk dalam kategori sektor basis di kabupaten Kudus, yang artinya kedua sektor ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus dan daerah luar berpeluang untuk masuk pada sektor yang sama guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus. Namun kedua sektor ini dapat dikembangkan untuk menjadi sektor basis.

### **Saran**

Untuk sektoral industri pengolahan diharapkan lebih mensejahterakan pegawainya, karena mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Kudus adalah buruh rokok. Apalagi jika dilihat dari kondisi tenaga kerja di Kabupaten Kudus yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai buruh rokok tapi tidak ada peningkatan untuk kesejahteraan hidup.

Pemerintah Kabupaten Kudus diharapkan memberikan infrastruktur, prasarana dan fasilitas yang baik supaya sektor yang lain seperti perdagangan besar dan eceran mampu menjadi sektoral yang unggul atau sektor basis terhadap perekonomian di Kabupaten Kudus. Karena kabupaten Kudus dijadikan sebagai trade center nasional, maka sektoral ini mampu menjadi sektor basis jika pemerintah lebih memfokuskan untuk sektoral ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anik. 2014. *Analisis Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus*. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya

- Arikunto, Suharsini .1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan IX. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 2000. *Pengatur Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Pertama)*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Lima)* .Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Ballo. 2012. *Analisis Disparitas Regional dan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah*. Diakses pada <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jateng> tanggal 29 Oktober 2016
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka 2011-2014*. Diakses pada [bps.go.id](http://bps.go.id) tanggal 28 Maret 2017
- BPS Kabupaten Kudus. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kudus*. Kudus : BPS. Kab Kudus
- BPS Kabupaten Kudus. 2016. *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2016*. Kudus : Badan Pusat Statistika Kudus
- Boedinono.2008. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Cahyadi. 2012. *Analisis Kontribusi Sektoral dan Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Regional Antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Dylla. 2008. *Analisis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*. Diakses pada <http://repository.ipb.ac.id> tanggal 5 November 2016
- Fachrurrazzy. 2009. *Analisis Penentu Sektor Unggulan Perekonomian di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentukan PDRB*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Hasani, Akram. 2010. *Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Shift Share di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008*. Semarang : Program Sarjana Universitas Diponegoro
- Kabupaten Kudus. *Profil Kabupaten Kudus*. Diakses pada <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-kudus> tanggal 28 Oktober 2016
- Mankiw Gregory.2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Salemba Empat
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang Mengenai Perencanaan Pembangunan Nasional*. Diakses pada <http://www.peraturan.go.id> tanggal 28 Oktober 2016.
- Pujiati Amin. 2006. Analisis Kawasan Andalan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 11 No 2*
- Rachbini, Didik. 2001. *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sambodo, M. T. 2002. Analisis Sektor Unggulan Di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. X : 33*
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Sumatra Barat : Boduose Media Padang
- Sukirno, S. 2000, *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara (Edisi Revisi)
- Todaro, M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- World Bank. 2001. *World Development Indicator*. Washington DC: World Bank.